



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERYAWAN**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS, KEUANGAN, DAN HUMAN CAPITAL**
3. NHK : **199233**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.738.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI , HASIL SENDIRI Rp. 501.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI , HASIL SENDIRI Rp. 306.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/97 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.355.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
5. Tanah Seluas 1539 m2 di KAB / KOTA KOTA BINJAI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 427.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 46.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
8. Tanah Seluas 87000 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 767.220.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR (KHARISMA) Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.220.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, HONDA COP PLN SEDAN (HONDA CITY) Tahun 2014,



HASIL SENDIRI Rp. 164.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI COP PLN PAJERO Tahun 2017, HASIL

SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.630.485.050
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.813.806.107
F. HARTA LAINNYA	Rp.	753.600.000
Sub Total	Rp.	10.703.611.157
III. HUTANG	Rp.	5.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.698.611.157

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.